



Kebijakan Antisuap dan Antikorupsi

Pemilik kebijakan/ dikeluarkan oleh	Disetujui oleh	Tanggal dikeluarkan/ ditinjau	Berlaku sejak	Peninjauan berikutnya
Chief Legal & Risk Officer (Pimpinan Eksekutif Hukum & Risiko) & Group Company Secretary (Sekretaris Perusahaan Grup)	Group Executive Team (Tim Eksekutif Grup) atas nama Direksi	Juni 2018	Juni 2018	Juni 2019

Untuk tujuan kebijakan ini, semua perusahaan dalam struktur Coats Group plc akan disebut sebagai 'Coats' atau 'Perusahaan'. Kebijakan ini ('Kebijakan') harus dibaca bersama dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan serta Kebijakan tentang Pelaporan yang dapat ditemukan pada bagian kebijakan di Coats World.

Daftar isi

Pernyataan kebijakan mengenai kepatuhan antisuap dan antikorupsi	3
1. Latar Belakang	4
2. Cakupan Kebijakan Antisuap & Antikorupsi ('Kebijakan').....	4
3. Konsekuensi pelanggaran.....	4
4. Prinsip utama.....	4
5. Definisi.....	5
6. Persyaratan umum	5
7. Tanggung Jawab – Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi).....	6
8. Uji tuntas dan Pihak Ketiga	6
9. Pembayaran fasilitasi	8
10. Hadiah, keramahtamahan, dan hiburan.....	8
11. Sumbangan politik dan amal	8
12. Pencatatan	9
13. Pelatihan.....	9
14. Peninjauan.....	9
15. Pertanyaan dan informasi	9
16. Kontak	9
17. Pertanyaan yang sering diajukan	10
LAMPIRAN: Studi Kasus	13

Pernyataan kebijakan mengenai kepatuhan antisuap dan antikorupsi

Coats mewajibkan karyawan dan pekerjanya untuk bertindak secara jujur dan dengan integritas setiap saat dan melindungi sumber daya yang merupakan tanggung jawab mereka. Dalam konteks ini, Coats berkomitmen untuk memastikan bahwa kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi dan suap telah diberantas. Prinsip ini didasarkan pada komitmen Direksi Coats Group plc terhadap nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang mendasar. Coats bertujuan menciptakan dan menjaga budaya internal berbasis kepercayaan dan inklusif yang tidak menoleransi suap dan korupsi, termasuk pembayaran fasilitasi.

Dokumen ini menguraikan kebijakan Coats untuk pengendalian tindak korupsi dan suap yang sebenarnya dan yang diduga terjadi di dalam Coats, serta proses yang harus diikuti jika ditemukan tindak korupsi atau suap yang aktual atau diduga dilakukan.

Coats akan meninjau kembali hubungannya dengan setiap pihak ketiga yang diduga secara wajar oleh Coats telah terlibat dalam suap atau korupsi. Coats tidak akan ragu-ragu mengambil tindakan hukum dan/atau disipliner yang sesuai terhadap karyawan dan pihak ketiga yang melanggar program antisuap dan antikorupsi Perusahaan, termasuk kebijakan ini.

Anda diwajibkan membaca kebijakan ini dengan cermat dan memastikan bahwa Anda, staf Anda, serta pihak ketiga yang telah Anda tunjuk, mematuhi kebijakan ini setiap saat. Jika Anda terbukti pernah melanggar kebijakan ini, maka Anda akan dikenakan tindakan disipliner termasuk pemutusan hubungan kerja.

Jika Anda merasa ragu dengan aspek apa pun dari kebijakan ini atau bagaimana kebijakan ini berlaku pada perjanjian atau proposal tertentu, **MINTALAH SARAN** dari manajer lini Anda atau dari Anti-Corruption Officer (Pejabat Antikorupsi), dengan perincian sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini.

Group Executive Team (Tim Eksekutif Grup)

Ingat – Jika ragu minta saran

Richard Reade
Anti-corruption Officer

Coats Group plc
1 The Square
Stockley Park
Uxbridge
UB11 1TD

T: +44 (0)20 8606 6649
M: +44 (0)7810 853967

1. Latar Belakang

1.1. Suap dan korupsi adalah tindak kriminal di setiap negara tempat Coats beroperasi. Undang-undang antisuap dan antikorupsi berdampak signifikan pada operasional kita secara global. Khususnya, undang-undang yang meliputi Undang-Undang Suap (Inggris) dan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (AS) memengaruhi cara Coats harus berperilaku, termasuk saat berinteraksi dengan pihak ketiga, di mana pun di dunia.

2. Cakupan Kebijakan Antisuap & Antikorupsi ('Kebijakan')

- 2.1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Karyawan dan Pihak Ketiga (sebagaimana yang didefinisikan di bagian 5 di bawah ini) di mana pun lokasi geografisnya serta memberikan standar perilaku minimum yang diharapkan dari mereka.
- 2.2. Karena Kebijakan ini didasarkan pada undang-undang antikorupsi di Inggris dan AS, maka Kebijakan ini memberikan standar kepatuhan yang sangat tinggi dan oleh karena itu cenderung memenuhi sebagian besar standar lokal. Namun, kami menyarankan kepada Karyawan untuk memahami undang-undang antikorupsi yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat mereka berbisnis atas nama Coats.

3. Konsekuensi pelanggaran

- 3.1. Sanksi hukum untuk tindakan suap dan korupsi sangat berat, dan dapat termasuk penjara untuk individu yang terlibat. Misalnya, undang-undang Inggris menetapkan hukuman 7 hingga 10 tahun penjara atau denda tak terbatas. Selain itu, Coats bisa menghadapi denda yang berat atau hukuman pidana lainnya atas tindakan suap dan korupsi yang dilakukan oleh Karyawan dan Pihak Ketiga.
- 3.2. Coats akan memeriksa sepenuhnya segala aktivitas yang bertentangan dengan Kebijakan ini dan, bilamana berlaku, mengambil tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

4. Prinsip utama

4.1. Anda tidak boleh:

- Menawarkan, menjanjikan, atau memberikan 'sesuatu yang bernilai' (sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian 4.4 di bawah) kepada siapa pun (baik secara langsung maupun tidak langsung);
- Bermaksud membujuk atau memberi imbalan kepada siapa saja untuk melakukan fungsi atau aktivitas yang seharusnya dilakukannya dengan iktikad baik, tanpa memihak, atau berdasarkan kepercayaan (misalnya pemberian kontrak atau pesanan).

4.2. Anda tidak boleh:

- Menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau menerima sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Publik (baik secara langsung maupun tidak langsung);
- Bermaksud mendapatkan bisnis (misalnya kontrak) atau keuntungan dalam pelaksanaan bisnis (misalnya lisensi, izin, atau persetujuan).

4.3. Anda tidak boleh:

- Meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima sesuatu yang bernilai (secara langsung maupun tidak langsung);
- Sebagai imbalan, atau antisipasi, karena Anda atau orang lain melakukan fungsi atau aktivitas dengan tidak semestinya padahal aktivitas tersebut seharusnya dilakukan dengan iktikad baik, tidak memihak, atau berdasarkan kepercayaan.

4.4. Sesuatu yang bernilai dapat meliputi pembayaran uang tunai, kupon hadiah, hadiah mewah, sumbangan politik atau amal yang tidak sesuai, tiket acara hiburan, memberi pekerjaan kepada kerabat, pemberian layanan gratis, atau hal lainnya yang bernilai besar.

4.5. Penawaran, janji, atau pemberian sesuatu yang bernilai secara tidak langsung, misalnya, melalui kerabat atau rekan dekat orang yang bersangkutan.

4.6. Aktivitas dan fungsi yang diharapkan akan dilakukan dengan iktikad baik, tidak memihak, atau berdasarkan kepercayaan sangat luas dan termasuk sebagian besar hal yang: berhubungan dengan bisnis; terjadi selama masa hubungan kerja seseorang; atau bersifat publik.

4.6.1. Contoh yang spesifik antara lain: pemberian kontrak atau pesanan; penawaran kerja; pemberian izin atau lisensi; dan penyediaan layanan publik.

5. Definisi

5.1.

Karyawan	Berarti karyawan Coats dan semua pekerja yang melaksanakan tugas atas nama Coats, baik yang dipekerjakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Coats.
Pembayaran Fasilitas	Berarti pembayaran dalam jumlah kecil kepada Pejabat Publik agar dapat mengamankan atau mempercepat tindakan rutin pemerintah yang secara hukum berhak Anda terima (misalnya memproses visa, pengiriman barang secara aman). Terkadang disebut juga sebagai uang "pelicin".
Pejabat Publik	Berarti individu yang: a) didefinisikan sebagai pejabat publik dalam hukum nasional di suatu negara; b) memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudikatif apa pun, baik ditunjuk maupun dipilih; c) melaksanakan fungsi publik; atau d) merupakan pejabat atau agen suatu organisasi internasional publik. Ini meliputi karyawan dan pejabat perusahaan milik negara.
Pihak Ketiga	Berarti agen, perantara, mitra, distributor, konsultan, pemasok, kontraktor, penyedia layanan, mitra usaha patungan, dan individu atau entitas lainnya yang menyediakan layanan untuk atau bertindak atas nama Coats.

6. Persyaratan umum

6.1. Coats berkomitmen untuk mematuhi undang-undang antisuap dan antikorupsi yang berlaku di semua negara tempat Coats berbisnis.

- 6.2. Coats, Karyawannya, dan Pihak Ketiga (di mana pun yurisdiksinya) tidak boleh terlibat dalam aktivitas apa pun yang merupakan atau dapat dianggap sebagai suap. Setiap penawaran untuk menyuap seseorang merupakan tindakan yang tidak layak, terlepas dari apakah penawaran tersebut diterima atau tidak, atau hasil yang dimaksudkan diperoleh atau tidak.
- 6.3. Coats (yang bertindak melalui Karyawannya dan/atau Pihak Ketiga) akan mencatat semua transaksi bisnis secara akurat dalam pembukuan dan catatannya.
- 6.4. Coats tidak akan menoleransi keterlibatan Karyawannya atau Pihak Ketiga dalam tindakan suap atau korupsi. Semua laporan tentang insiden tindak korupsi atau suap yang aktual atau diduga akan secara langsung dan secara menyeluruh diperiksa dan ditangani dengan sesuai (termasuk tindakan disipliner yang berlaku).
- 6.5. Karyawan dan Pihak Ketiga diwajibkan menaruh perhatian pada keadaan di mana mereka yakin bahwa **terjadi, mungkin terjadi, telah terjadi, atau mungkin telah terjadi** perilaku yang tidak layak oleh Karyawan atau Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan Kebijakan ini dan Kebijakan Pelaporan (yang salinannya dapat ditemukan di Coats World). Semua permasalahan akan ditangani secara rahasia dan secara ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pribadi yang sah dari Karyawan.
- 6.6. Coats, Karyawannya, dan Pihak Ketiga harus ekstra hati-hati saat berhubungan dengan Pejabat Publik, termasuk saat mempertimbangkan untuk memberikan hadiah atau keramahtamahan kepada Pejabat Publik. Lihat Kebijakan Hadiah dan Hiburan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

7. Tanggung Jawab – Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi)

- 7.1. Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi) bertanggung jawab di dalam Perusahaan untuk memberikan saran mengenai persoalan antisuap dan antikorupsi.

8. Uji tuntas dan Pihak Ketiga

- 8.1. Coats mungkin harus bertanggung jawab atas tindakan suap oleh Pihak Ketiga, di mana saja di seluruh dunia.
- 8.2. **Sebelum** bekerja dengan Pihak Ketiga, Karyawan diwajibkan melakukan uji tuntas dan penilaian risiko terhadap Pihak Ketiga untuk memahami latar belakang dan reputasi Pihak Ketiga serta untuk memahami setiap risiko suap dan korupsi yang mungkin ada.
- 8.3. Tingkat **minimum** uji tuntas yang wajib **dilakukan** dan **didokumentasikan** adalah:
 - 8.3.1. Melakukan pencarian mengenai perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan didirikan dengan benar dan terdaftar pada otoritas yang sesuai (misalnya mencari di Pencatatan Komersial);
 - 8.3.2. Meninjau Pihak Ketiga dan potensi hubungan bisnis untuk mencari tanda peringatan apa pun (harap lihat bagian 8.5 di bawah untuk mendapatkan penjelasan mengenai tanda peringatan);
 - 8.3.3. Meninjau mitra bisnis potensial Pihak Ketiga (harap lihat pertanyaan 9 di Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) di bawah sebagai panduan);

- 8.3.4. Meninjau proyek atau transaksi bisnis yang diusulkan agar dapat mengidentifikasi sejauh mungkin risiko korupsi atau suap (lihat pertanyaan 10 di FAQ sebagai panduan).
- 8.3.5. Memastikan diadakannya perjanjian antara Coats dan Pihak Ketiga yang mencerminkan hubungan bisnis dan memasukkan klausul antisuap dan antikorupsi, termasuk hak untuk mengaudit Pihak Ketiga terkait kepatuhan terhadap persyaratan klausul (harap minta bantuan dari Tim Hukum jika diperlukan); dan
- 8.3.6. Mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk peninjauan Pihak Ketiga termasuk pemeriksaan uji tuntas dan semua dokumen pendukung. Dokumen akan menjadi bukti bagi auditor, regulator, dan Coats bahwa proses uji tuntas yang sesuai telah dilakukan.
- 8.4. Jika tanda peringatan apa pun atau masalah lainnya muncul selama uji tuntas, Anda harus menghubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi) yang akan memberikan saran lebih lanjut, termasuk mengenai pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan sebelum menggunakan Pihak Ketiga.

Tanda peringatan

- 8.5. Saat melakukan uji tuntas terhadap Pihak Ketiga, perhatikan indikator tanda peringatan untuk kemungkinan masalah suap atau korupsi. Tanda peringatan meliputi:

Rujukan dari Pihak Ketiga

- 8.5.1. Seorang Pejabat Publik menyarankan kepada Coats untuk merekrut pihak ketiga tertentu.
- 8.5.2. Pihak Ketiga yang ingin digunakan oleh Coats tidak memiliki kualifikasi atau staf yang memadai untuk melakukan layanan yang diharapkan.
- 8.5.3 Pihak Ketiga sangat mengandalkan kontak politik atau pemerintah, dan bukan keahlian teknis atau pengalaman.
- 8.5.4. Pihak Ketiga yang sama berulang kali digunakan untuk bisnis tanpa pembenaran apa pun yang masuk akal atas penunjukannya berulang kali.

Penyimpangan Keuangan

- 8.5.5. Usulan kompensasi Pihak Ketiga terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tarif dalam pasar dan tidak ada penjelasan yang masuk akal.
- 8.5.6. Pengaturan kompensasi yang diusulkan tidak biasa (misalnya tarif komisi yang terlalu tinggi, atau pengaturan biaya keberhasilan tergantung pada pemberian kontrak atau izin).
- 8.5.7 Pihak Ketiga meminta pembayaran:
- 8.5.7.1. untuk dilakukan ke luar negeri;
 - 8.5.7.2. untuk diberikan kepada orang atau entitas berbeda;
 - 8.5.7.3. untuk dipisahkan di antara beberapa rekening;

8.5.7.4. untuk dilakukan ke rekening di negara selain tempat Pihak Ketiga berlokasi atau tempat bisnis akan dilakukan; atau

8.5.7.5. yang merupakan pengaturan keuangan yang tidak biasa.

8.5.8. Setelah memeriksa rujukan, Anda menemukan bahwa Pihak Ketiga memiliki reputasi yang diragukan atau tidak dikenal di industri ini.

8.5.9. Pihak Ketiga yang ingin digunakan oleh Coats enggan menggunakan kontrak resmi tertulis, atau menolak menyertakan klausul antisuap dan antikorupsi.

8.6. Perlu diingat bahwa daftar ini tidak lengkap dan mungkin masih ada contoh lain yang berpotensi sebagai tanda-tanda suap atau korupsi. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai apakah suatu Pihak Ketiga harus digunakan atau tidak, Anda harus menghubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi).

8.7. Ada beberapa contoh studi kasus yang tercantum dalam Lampiran pada Kebijakan ini.

9. Pembayaran fasilitasi

9.1. Coats melarang Pembayaran Fasilitasi oleh Karyawannya dan Pihak Ketiga. Pembayaran Fasilitasi adalah tindakan ilegal di hampir semua negara tempat Coats beroperasi.

9.2. Satu-satunya pengecualian adalah jika tidak ada alternatif sehingga harus melakukan Pembayaran Fasilitasi agar dapat melindungi terhadap cedera, kehilangan nyawa, atau kebebasan. Berdasarkan kondisi pengecualian ini, Karyawan harus memberi tahu Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi) secara tertulis sesegera mungkin. Setiap pembayaran yang dilakukan harus dicatat dengan akurat. Pengecualian yang sempit ini hanya berlaku pada situasi di mana ada ancaman langsung atas kekerasan atau bahaya diri. Pengecualian ini **tidak** berlaku untuk "pemerasan" komersial.

9.3. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai apakah suatu pembayaran mungkin dianggap sebagai Pembayaran Fasilitasi atau tidak, Anda harus menghubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi) untuk meminta saran terlebih dahulu.

10. Hadiah, keramahtamahan, dan hiburan

10.1 Dalam **semua** kasus di mana Anda mempertimbangkan penawaran atau penerimaan hadiah, keramahtamahan, atau hiburan, Anda harus terlebih dahulu membaca Kebijakan Hadiah dan Hiburan, yang dapat ditemukan di Coats World.

11. Sumbangan politik dan amal

11.1. Semua sumbangan politik dan amal baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung harus mematuhi undang-undang yang berlaku, harus dapat diungkapkan secara publik, dan harus tidak bisa dianggap sebagai suap.

- 11.2. Dilarang meminta atau mengizinkan pembayaran atas nama Coats kepada Pejabat Publik, partai politik, kandidat atau pejabat politik, kecuali jika sebelumnya telah memperoleh izin dari Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi) yang akan menentukan apakah usulan pembayaran tersebut diizinkan atau tidak.
- 11.3. Untuk mendapatkan informasi tentang sumbangan politik pribadi, Anda harus menghubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi).

12. Pencatatan

- 12.1. Semua transaksi harus dicatat secara jujur dan akurat dalam pembukuan dan catatan Coats. Tidak boleh ada rekening rahasia atau yang “tak tercatat”. Tidak boleh ada dokumen yang dibuat secara tidak wajar dan tidak akurat mencerminkan transaksi yang terkait.
- 12.2. Semua pencairan dana dan transaksi keuangan lainnya harus diotorisasi oleh manajemen berdasarkan pendelegasian wewenang yang sesuai.
- 12.3. Dana yang tidak diungkapkan atau tidak dicatat tidak boleh dibayarkan untuk tujuan apa pun.
- 12.4. Dana Coats tidak boleh disimpan di rekening pribadi atau rekening nonperusahaan.

13. Pelatihan

- 13.1. Coats akan memberikan pelatihan kepada semua Karyawan yang diidentifikasi memegang jabatan yang memiliki risiko suap dan korupsi untuk memastikan bahwa mereka mengetahui berbagai jenis korupsi dan suap, risiko terlibat dalam aktivitas korupsi dan suap, serta cara mereka dapat melaporkan korupsi dan suap yang aktual atau diduga. Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke pelatihan yang sesuai. Namun, Coats akan memberikan pelatihan tersebut jika diminta untuk melakukannya.

14. Peninjauan

- 14.1. Setiap tahun, Coats akan meninjau Kebijakan ini dengan mempertimbangkan setiap perubahan pada undang-undang yang berlaku dan merevisinya. Setiap dua tahun, Coats akan melaksanakan penilaian dan sertifikasi independen terhadap Kebijakan ini dan akan merevisi Kebijakan jika perlu dengan mempertimbangkan penilaian independen tersebut.

15. Pertanyaan dan informasi

- 15.1. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut mengenai aspek apa pun dari Kebijakan ini, harap hubungi anggota Tim Hukum dan/atau salah satu dari kontak yang tercantum di bawah ini.

16. Kontak

- 16.1. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
- 16.1.1. Manajer lini Anda
 - 16.1.2. Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi)

17. Pertanyaan yang sering diajukan

P1 Bagaimana cara mengetahui jika suatu negara memiliki undang-undang antisuap atau antikorupsi?

J1 Selalu asumsikan bahwa suatu negara memiliki undang-undang antisuap atau antikorupsi. Faktanya, beberapa negara memiliki hukuman berat, termasuk hukum mati untuk tindak korupsi. Konvensi Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (Konvensi Antisuap) merupakan titik panduan yang paling terkenal untuk perusahaan. Konvensi Antisuap itu sendiri menetapkan standar untuk menghukum tindakan suap kepada pejabat publik asing. Negara-negara yang mengadopsi Konvensi Antisuap kemudian harus mengadopsi perundang-undangannya sendiri yang menghukum tindakan suap kepada pejabat publik asing. Sebagian besar negara bagian dan daerah memiliki undang-undang antisuap dan antikorupsi. Undang-undang yang terkait di Inggris, misalnya, adalah Undang-Undang Suap, sementara di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Kedua undang-undang ini memiliki pengaruh lintas batas, yang berarti berpotensi berlaku terhadap perilaku warga negaranya masing-masing di mana pun di dunia. Mungkin terdapat juga aturan dan peraturan setempat yang mengatur hadiah apa yang dapat diterima oleh Pejabat Publik. Anda harus menghubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi) jika menginginkan informasi lebih lanjut mengenai undang-undang antikorupsi. Namun, Kebijakan ini menetapkan standar yang berlaku untuk Coats di dunia.

P2 Di mana saya dapat menemukan informasi mengenai tingkat korupsi suatu negara?

J2 Salah satu sumber informasinya adalah Transparency International (<http://www.transparency.org>), sebuah organisasi global yang fokus memberantas korupsi. Setiap tahun, Transparency International menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi, yang mengukur tingkat persepsi korupsi di berbagai negara.

P3 Jika undang-undang anti suap atau antikorupsi di beberapa negara mengizinkan Pembayaran Fasilitasi, mengapa Coats melarangnya?

J3 Di sebagian besar yurisdiksi di seluruh dunia di mana Coats berbisnis, undang-undang setempatnya melarang Pembayaran Fasilitasi. Selain ilegal, menawarkan uang dengan korupsi atau hal apa pun yang bernilai untuk layanan atau untuk memengaruhi keputusan adalah tindakan yang tidak etis dan merupakan praktik bisnis yang buruk. Perilaku tersebut tidak selaras dengan komitmen Coats untuk berbisnis secara etis dan berintegritas.

P4 Apakah Coats masih dapat berbisnis dengan entitas milik pemerintah?

J4 Ya. Undang-undang antikorupsi tidak menghalangi Coats untuk melakukan bisnis yang sah dengan entitas pemerintah atau Pejabat Publik. Namun, Anda harus selalu waspada terhadap kemungkinan tanda peringatan atau indikator tindak korupsi dan suap (termasuk yang terkait dengan Pihak Ketiga yang bertransaksi dengan entitas pemerintah dan Pejabat Publik atas nama Coats). Jika Anda menduga atau menyadari adanya tindak korupsi atau suap, Anda harus segera menghubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi).

P5 Apakah saya harus mengetahui persyaratan lain saat berinteraksi dengan Pejabat Publik?

J5 Ya, ada sejumlah persyaratan yang berlaku terhadap interaksi dengan Pejabat Publik, termasuk persyaratan yang melarang pemberian hadiah, makanan, dan/atau hiburan kepada pejabat pemerintah, dan pembatasan mengenai dan pengungkapan sumbangan politik.

Hadiah, makanan, keramahtamahan, dan/atau hiburan tidak boleh ditawarkan kepada Pejabat Publik kecuali jika persetujuan sebelumnya telah diperoleh sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan.

P6 Apa yang terjadi jika Karyawan menawarkan suap kepada Pejabat Publik tapi akhirnya tidak jadi membayar suap tersebut? Apakah hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang antisuap atau antikorupsi yang berlaku?

J6 Ya. Penawaran untuk memberikan sesuatu kepada Pejabat Publik sebagai imbalan atas penggunaan kekuasaan orang tersebut untuk memengaruhi keputusan – bahkan jika pembayaran tersebut tidak benar-benar dilakukan – akan dianggap melanggar undang-undang antisuap atau antikorupsi yang berlaku – dan akan melanggar kebijakan Coats.

P7 Saya menyadari bahwa beberapa pembayaran tampak aneh pada bulan lalu, tapi setelah secara singkat membahas pembayaran tersebut dengan anggota tim yang lain, saya memutuskan untuk membiarkan pembayaran tersebut tanpa mempertanyakannya lebih lanjut. Apakah tindakan saya tersebut salah?

J7 Ya. Jika Anda menyadari akan adanya pembayaran yang meragukan atau aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda peringatan lainnya, Anda harus segera menghubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi). Mengabaikan, pura-pura tidak tahu, atau tidak menandai informasi yang bermasalah atau tanda peringatan untuk peninjauan lebih lanjut adalah hal yang tidak dapat diterima berdasarkan Kebijakan ini. Tindakan tersebut juga melanggar undang-undang antisuap dan antikorupsi.

P8 Apa saja hukuman atas pelanggaran undang-undang antisuap atau antikorupsi, seperti Undang-undang Inggris tentang Suap atau Undang-Undang Praktik Korupsi Asing?

J8 Pelanggaran terhadap undang-undang antisuap atau antikorupsi dapat mengakibatkan hukuman pidana yang signifikan baik bagi individu maupun perusahaan, termasuk denda dan penjara.

Hukuman lainnya, misalnya dilarang melakukan aktivitas bisnis dengan pemerintah atau Pejabat Publik untuk sementara waktu, larangan berpartisipasi dalam bisnis sekuritas, pengusiran dari yurisdiksi setempat, serta hukuman pidana dan perdata setempat, juga mungkin berlaku.

P9 Bagaimana cara meninjau dan menilai potensi risiko Pihak Ketiga?

J9 Beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah:

- Pernahkah Anda mengambil langkah-langkah untuk membuktikan latar belakang dan kualifikasi dari suatu individu dan/atau perusahaan?
- Pernahkah Anda mempertimbangkan sejauh mana perusahaan boleh mempekerjakan karyawan, operator pihak ketiga, atau kerabat yang mungkin berada dalam posisi yang dapat memengaruhi cara seseorang melakukan layanan untuk Coats, misalnya apakah mereka terkait dengan Pejabat Publik?
- Pernahkah Anda mengambil langkah-langkah untuk mencari tahu apakah seseorang yang terkait dengan perusahaan individu tersebut pernah mengalami kebangkrutan, dilarang mengikuti pengadaan publik, dikenai putusan pidana atau sedang diselidiki gara-gara suap, penipuan, pelanggaran undang-undang perusahaan, penggelapan, pengelakan pajak, akuntansi palsu, pelanggaran impor/ekspor atau antipersaingan?
- Pernahkah Anda menelusuri semua rujukan individu tersebut secara memadai, memeriksa dokumen pendaftaran perusahaan, bukti pendaftaran pada otoritas pajak lokal, dan menanyakan tentang kontrak yang signifikan atau relevan di perusahaan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan individu/perusahaan tersebut?
- Apakah Anda puas bahwa Anda dapat mengharuskan seseorang menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum yang mempersyaratkan, misalnya, larangan secara tegas untuk tidak menyuap atas nama Coats?

P10 Bagaimana cara meninjau proyek atau transaksi bisnis yang diusulkan agar sedapat mungkin bisa mengidentifikasi kemungkinan risiko korupsi atau suap?

J10 Beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah:

- Apakah mengandalkan perantara untuk memasuki pasar tertentu dibenarkan?
 - Apakah mungkin untuk mengurangi atau membatasi ketergantungan Coats pada perantara?
 - Apakah tujuan Coats akan tercapai dengan baik melalui badan hukum, kemitraan, atau individu?
 - Apakah Coats perlu memberikan hak eksklusif kepada seseorang atau perusahaan untuk menyediakan layanan di negara tertentu?
 - Apakah Coats pernah benar-benar menilai risiko ketergantungan pada agen di negara tertentu secara umum?
-

LAMPIRAN: Studi Kasus

Dua studi kasus di bawah ini memungkinkan Karyawan meninjau skenario hipotesis yang mungkin dihadapi Coats. Selain itu, studi kasus lebih lanjut tersedia dalam kursus pelatihan online yang telah dibuat Coats yang wajib diikuti semua Karyawan.

Studi Kasus 1 – Usaha Patungan

Coats tertarik pada pengembangan benang terbaru yang diciptakan Perusahaan E ('E'). Oleh karena itu, Coats mengusulkan untuk membentuk usaha patungan dengan E. Usulan menyatakan bahwa Coats dan E akan memiliki kepemilikan yang sama dalam perusahaan usaha patungan ('CE'). Coats mengidentifikasi interaksi yang perlu antara CE dan pejabat publik setempat sebagai sumber risiko suap yang signifikan.

Coats dapat mempertimbangkan negosiasi untuk menyertakan salah satu atau kombinasi dari prosedur pencegahan tindak suap berikut ini ke dalam perjanjian yang membentuk CE:

- Keseimbangan representasi dalam direksi CE.
- CE menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang suap dan korupsi yang berlaku. Langkah-langkah ini dapat mencakup beberapa masalah, seperti:
 - hadiah dan keramahtamahan
 - aturan pengambilan keputusan yang disetujui
 - pengadaan
 - penggunaan pihak ketiga, termasuk persyaratan uji tuntas
 - perilaku hubungan dengan Pejabat Publik
 - pelatihan untuk staf yang menduduki jabatan yang berisiko tinggi
 - pembukuan dan akuntansi.
- Pembentukan komite audit dengan setidaknya satu perwakilan dari C dan E yang memiliki kuasa untuk melihat rekening dan pengeluaran tertentu serta mempersiapkan laporan rutin.

Komitmen yang mengikat antara Coats dan E untuk mematuhi semua undang-undang suap yang berlaku sehubungan dengan operasi CE, dan pelanggaran terhadap komitmen ini baik oleh Coats ataupun E akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap perjanjian di antara keduanya. Hal ini dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian atau konsekuensi signifikan serupa lainnya.

Semua karyawan harus memastikan bahwa klausul antisuap dan korupsi disertakan dalam semua kontrak yang ditandatangani oleh relasi bisnis baru. Selain itu, karyawan harus memastikan bahwa klausul tersebut juga disertakan dalam perjanjian pembelian, perjanjian layanan, dan perjanjian pihak ketiga lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi Anti-corruption Officer (Pejabat Antikorupsi).

Studi Kasus 2 – Uji Tuntas agen

Coats memiliki kesempatan untuk memasuki pasar yang sedang berkembang di negara asing ('H') melalui kontrak pemerintah untuk memasok peralatan ke negara tersebut. Peraturan setempat mewajibkan organisasi komersial asing untuk beroperasi melalui agen setempat. Coats menunjuk suatu agen terkemuka dan memastikan bahwa risiko suap yang digunakan untuk mengembangkan bisnisnya di pasar itu diminimalisir.

Coats dapat mempertimbangkan salah satu atau kombinasi dari langkah berikut ini:

- Menyusun kuesioner yang sesuai untuk calon agen yang mengharuskan, misalnya, menyerahkan detail kepemilikan jika bukan perorangan; CV dan rujukan bagi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan layanan yang diusulkan; detail jabatan direktur, kemitraan dan hubungan pihak ketiga yang ada, serta segala temuan yudikatif atau regulasi yang relevan.
- Memiliki pernyataan yang jelas mengenai perincian sifat layanan yang ditawarkan, harga, komisi, biaya, dan cara remunerasi yang dipilih.
- Melakukan penelitian, termasuk penelusuran di internet, terhadap calon agen dan, jika merupakan badan hukum, terhadap setiap orang yang diidentifikasi memiliki tingkat pengendalian tertentu atas urusan perusahaan.
- Mengajukan pertanyaan kepada otoritas terkait di H untuk memverifikasi informasi yang diterima sebagai respons terhadap kuesioner.
- Menindaklanjuti rujukan dan mengklarifikasi setiap persoalan yang muncul dari kuesioner atau informasi lain yang diterima dengan agen, dengan mengatur pertemuan tatap muka jika sesuai.
- Meminta untuk melihat kebijakan antisuap serta, jika merupakan badan hukum, prosedur pelaporan dan catatan milik setiap calon agen atau bukti dari dokumen-dokumen tersebut.
- Waspada dengan pertanyaan komersial utama, seperti:
 - Apakah agen tersebut benar-benar diperlukan?
 - Apakah agen tersebut memiliki keahlian yang diperlukan?
 - Apakah mereka berinteraksi dengan atau berhubungan erat dengan Pejabat Publik?
 - Apakah yang bayaran Anda usulkan bersifat wajar dan komersial?
- Memperbarui pertanyaan uji tuntas secara berkala jika agen ditunjuk.

Anda akan mengingat bahwa paragraf 8 dari Kebijakan ini memasukkan prosedur uji tuntas yang harus digunakan untuk pihak ketiga secara umum.